

PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar
di-
tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Aulia Rakhman
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	: 6777383823929312381432
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2335
Alamat	: Desa Pematang Danau
Bertindak untuk dan atas nama	:
*) <i>untuk pemohon pelaku usaha</i>	

dengan ini mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka: *)

1. Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi,
2. Pemberian/Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Atas Tanah,
3. Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul,
4. Perubahan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

*) *pilih salah satu*

untuk keperluan Tempat Usaha

dengan keterangan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Letak tanah yang dimohon | : |
| a. Jalan, nomor, RT/RW | : Desa Paring Tali, RT 011 RW 001 |
| b. Desa/Kelurahan | : Makmur |
| c. Kecamatan | : Gambut |
| 2. Luas tanah yang dimohon | : 6352 |
| 3. Status/penguasaan tanah | : Hak Guna Usaha |
| 4. Penggunaan tanah saat ini | : Rumah |

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

No.	Jenis Permohonan	Syarat
1.	Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Keputusan Pemberian Izin Lokasi dan Lampirannya 3. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen atau Tanpa Komitmen 4. Peta yang memuat koordinat polygon batas lokasi yang dimohon 5. Rencana kegiatan usaha atau rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah 6. Pernyataan mengenai letak dan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha grup
2.	Pemberian/Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Atas Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kuasa, apabila dikuasakan 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum, untuk pemohon badan hukum 5. Fotokopi Izin Usaha, untuk pemohon badan hukum 6. Peta yang memuat koordinat polygon batas letak lokasi 7. Rencana kegiatan usaha atau rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah 8. Pernyataan mengenai letak dan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha grup, untuk pemohon badan hukum
3.	Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kuasa, apabila dikuasakan 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum, untuk pemohon badan hukum 5. Fotokopi Izin Usaha, untuk pemohon badan hukum 6. Peta yang memuat koordinat polygon batas letak lokasi 7. Rencana kegiatan usaha atau rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah 8. Pernyataan mengenai letak dan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha grup, untuk pemohon badan hukum
4.	Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kuasa, apabila dikuasakan, 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak, 4. Peta yang memuat koordinat polygon batas letak lokasi, 5. Rencana kegiatan usaha atau rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan kami bertanggungjawab atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan di atas.

Martapura, 16 November 2022

Pemohon,

(Aulia Rakhman)

Proposal Rencana Kegiatan Pengajuan Pertimbangan Teknis Pertanahan Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

I. Maksud / Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan : Tempat Usaha

II. Letak dan Luas Tanah

Alamat : Desa Pematang Danau

Desa / Kelurahan : Makmur

Kecamatan : Gambut

Kabupaten : Banjar

Luas : 6352

No Sertifikat : 00227

Atas Nama : Aulia Rakhman

III. Pengajuan Pertimbangan Teknis Pertanahan

Dengan ini Saya mengajukan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Tanah Pertanian ke Non Pertanian. Saya akan menggunakan tanah tersebut sesuai dengan Arahana Fungsi Kawasan dan akan melakukan Kegiatan sesuai dengan yang dimohonkan setelah memenuhi persyaratan yang diatur oleh Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab atas segala akibat yang ditimbulkan sebab pelaksanaan kegiatan yang dimohon.

Martapura, 16 November 2022

(Aulia Rakhman)
Pemohon